



Jembatan Kewek: Jejak Sejarah dan Darurat Kemanusiaan



JUDUL Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat (27/11/ 2025) "Segera, Perbaiki Jembatan Kewek" adalah peringatan keras yang tidak boleh kita anggap sebagai sekadar *headline*. Seruan itu adalah alarm publik yang menandai urgensi perbaikan menyeluruh atas sebuah jembatan yang kini dinilai sudah tidak aman untuk digunakan.

Setiap hari, Jembatan Kewek atau yang oleh warga Yogyakarta lebih akrab disebut Jembatan Kleringan menjadi urat nadi yang menghubungkan denyut ekonomi, sosial, dan budaya kota. Ia bukan sekadar penghubung Malioboro dan Kotabaru; ia adalah simpul strategis yang memungkinkan ribuan roda, langkah kaki, roda wisata, pekerjaan, hingga aktivitas pendidikan berjalan tanpa henti. Jembatan ini adalah aliran darah yang menjaga nadi kota tetap berdenyut.

Namun, kepercayaan massal itu kini bertumpu pada struktur yang rapuh. Kajian teknis terbaru Dinas Pekerjaan Umum menunjukkan kekuatan struktur jembatan hanya tersisa sekitar 20 persen - angka yang dalam dunia teknik sipil bukan lagi sekadar peringatan, tetapi status darurat yang mengancam keselamatan publik. Kita tidak sedang membicarakan retakan permukaan, tetapi degradasi struktural yang dapat berujung pada keruntuhan.

Di tengah situasi genting tersebut, langkah birokrasi justru berjalan lambat. Pemerintah Kota Yogyakarta memang telah merampungkan Detail Engineering Design (DED), namun eksekusi perbaikan baru direncanakan terlaksana pada tahun 2026. Dalam konteks kedaruratan, penundaan terasa seperti menunggu bencana dengan kepala men-dongak ke langit sambil memegang *stop-watch*. Pertanyaannya, sanggupkah kita mempertaruhkan keselamatan ribuan pengguna jembatan selama itu?

Jembatan Kewek dalam Lintasan Sejarah

Mengurusi Jembatan Kewek bukan

Ki Eknathon

sekadar membenahi infrastruktur. Ia adalah monumen hidup peninggalan era kolonial, penghubung kawasan tradisional pribumi dan kawasan modern Kotabaru yang dulu dirancang sebagai permukiman Eropa. Setiap lengkung dan pilar menyimpan narasi tentang transformasi kota, perjumpaan budaya, dan perjalanan panjang masyarakat Yogyakarta menuju modernitas.

Sebuah kota yang beradab adalah kota yang menghormati memorinya. Membiarkan Jembatan Kewek rusak tanpa penanganan cepat bukan hanya pengabaian aset publik, tetapi juga pengingkaran terhadap sejarah yang membentuk identitas kolektif kita.

Falsafah, Konstitusi, dan Mandat Perlindungan

Dalam kearifan Jawa terdapat ajaran *hamemayu hayuning bawana* mewujudkan keselamatan dan keindahan dunia. Merawat jembatan adalah perwujudan konkret dari falsafah tersebut. Sementara itu, konstitusi melalui UUD 1945 menjamin hak warga atas rasa aman. UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 38 Tahun 2004 menegaskan pemeliharaan infrastruktur sebagai kewajiban pemerintah daerah.

Asas hukum *salus populi suprema lex esto* - keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi - seharusnya menjadi dasar percepatan, mengatasi segala kerumitan anggaran maupun prosedur.

Membiarkan kondisi jembatan dalam situasi kritis berarti menunggu bencana dengan sadar. Risikonya: Pertama, Risiko Struktural: Dengan kekuatan tersisa 20%, beban harian akan mempercepat kerusakan dan dapat memicu keruntuhan yang menelan banyak korban, baik di atas maupun di bawah jembatan.

Kedua, Risiko Ekonomi dan Sosial: Penutupan mendadak akan memutus mobilisasi,

melemahkan UMKM, mengganggu arus wisatawan, dan memengaruhi stabilitas ekonomi kota. Ketiga Risiko Kepercayaan Publik: Ketidakmampuan negara menangani situasi yang kasat mata akan menggerus legitimasi dan kepercayaan warga.

Seruan untuk Bertindak

Sudah saatnya pemerintah kota, Pemda DIY, dan pemerintah pusat mengambil langkah berani: Percepatan perbaikan melalui skema anggaran darurat atau pembiayaan khusus. Transparansi publik mengenai kondisi jembatan dan mitigasi risiko. Pembatasan beban kendaraan dengan pengawasan ketat untuk mencegah kejadian fatal. Kolaborasi lintas pemerintahan, menghapus sekat administratif demi keselamatan bersama.

Jembatan Kewek telah menjadi pelayan setia kehidupan Yogyakarta selama puluhan tahun. Kini, ia memanggil kita untuk bertanggungjawab. Memperbaikinya bukan sekadar proyek fisik, tetapi pernyataan moral bahwa nyawa manusia dan warisan sejarah tidak boleh dinegosiasi. Kita tidak boleh belajar melalui tragedi. Kita harus mencegahnya. Perbaiki Jembatan Kewek secepatnya. Jangan ditunda. Semoga. (*)-d

***)Drs Ki Eknathon MHum,**

Pemakai dan Pemerhati Jembatan Kewek.

Pojok KR

Banjir Sumatera, Presiden sudah tahu ada pembalakan liar.
- Segera ditindak !

Penyelundup 2 ton sabu diringkus, jaringan Golden Triangle.
- Produsennya juga harus ditangkap.

Masyarakat diimbau waspada potensi cuaca ekstrem.
- Antisipasi tak boleh terlambat.

Berats

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005